

**ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN KEADAAN TERHADAP
PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS YANG DILAKUKAN DI
DALAM TAHANAN (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor
3641/K/PDT/2001)**

Rangga Hardianto Atmowasito¹, Ninik Darmini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui dan menganalisa implikasi hukum dari akta Notaris yang pembuatannya diindikasikan ada penyalahgunaan keadaan dan 2) mengetahui dan menganalisa tindakan Notaris meminta penandatanganan akta notarial kepada pihak yang sedang dalam tahanan merupakan tindakan penyalahgunaan atau bukan (berdasar putusan Kasasi Nomor 3641/K/PDT/2001)

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Menggunakan data sekunder sebagai sumber data berjalannya penelitian. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu seluruh data dikumpulkan dan disusun secara sistematis oleh penulis untuk memberikan gambaran mengenai akibat hukum akta notarial terindikasi penyalahgunaan keadaan serta tindakan Notaris untuk meminta penandatanganan akta kepada salah satu pihak dalam tahanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi hukum dari akta notaris yang diindikasikan adanya penyalahgunaan keadaan pada proses pembuatan (berdasarkan putusan Kasasi Nomor 3641/K/PDT/2001) adalah dibatalkan, namun untuk secara umum harus dilihat per kasus karena belum adanya patokan mengenai penyalahgunaan keadaan dalam sistem hukum Indonesia, dan tindakan Notaris dalam putusan ini merupakan tindakan penyalahgunaan karena memanfaatkan kondisi psikologis pihak yang berada dalam tahanan untuk mendapatkan kesepakatan. Saran dalam penulisan ini adalah hakim harus berhati-hati dalam memutus perkara mengenai penyalahgunaan keadaan, dimana hakim harus melihat secara kasuistis, dan juga Notaris hendaknya dalam melaksanakan fungsi jabatannya harus selalu mematuhi peraturan, dan tidak berbuat sesuatu yang bisa merugikan pihak yang menggunakan jasanya.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Keadaan, Akta, Notaris, Rumah Tahanan Negara

1 Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 16, Sembego Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**LEGAL ANALYSIS OF ABUSE OF CONDITION
TOWARDS SIGNING OF NOTARY ACTIVITIES
CONDUCTED IN DETENTION (Case Study of
Cassation Decision Number 3641 / K / PDT /
2001)**

Rangga Hardianto Atmowasito³, Ninik Darmini⁴

ABSTRACT

This study aims to: 1) find out and analyze the legal implications of the Notary deed, which indicates abuse of circumstances and 2) to find out and analyze the Notary's action of requesting the signing of a notarial deed to the party who is in detention is an act of abuse or not (based on the decision of Cassation Number 3641 / K / PDT / 2001)

This research is descriptive using the normative approach method. Using secondary data as a data source for the progress of the research. This study was analyzed qualitatively, namely that all data were collected and compiled systematically by the author to provide an overview of the legal consequences of the notarial deed indicating abuse of circumstances as well as the Notary's actions to request the signing of the deed to one of the parties in detention.

The results show that the legal implications of the notary deed which indicate abuse of circumstances in the manufacturing process (based on the decision of Cassation Number 3641 / K / PDT / 2001) are canceled, but in general it must be seen on a case-by-case basis because there is no standard regarding the abuse of conditions in the system. Indonesian law, and the actions of the Notary in this decision are acts of abuse because they take advantage of the psychological conditions of the parties in detention to get an agreement. The suggestion in this writing is that judges must be careful in deciding cases regarding the abuse of circumstances, where judges must look casuistically, and also notaries should always comply with regulations, and not do anything that could harm the parties using their services.

Keywords : Undue Influence, Deed, Notary, State Detention Center

³ Pangeran Diponegoro Street No 16, Sembego Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta